

**REPUBLIK INDONESIA SERIKAT: TINJAUAN HISTORIS HUBUNGAN  
KAUSALITAS PERISTIWA-PERISTIWA PASCA KEMERDEKAAN TERHADAP  
PEMBENTUKAN NEGARA RIS (1945-1949)**

**Irvan Tasnuri, Muhammad Rijal Fadliz**

Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Yogyakarta

Penulis Korespondensi: exfadhlie@gmail.com

**Abstract:** The article aims to find out the causality relationship of post-independence events in the process of forming a RIS state (Republic of Indonesia United). Starting from the proclamation of independence on 17 August 1945, was the starting point of the struggle to become a whole country. The arrival of the Dutch on 16 September 1945, in order to re-install its power was opposed by all layers of society. Resistance also occurs in various regions, war and diplomacy are two ways that continue to go hand in hand in the dispute resolution process. Propaganda as an effective tool was used by the Dutch to divide the Indonesian state, the effort then succeeded with the formation of federal countries (puppet countries formed by the Netherlands). Diplomacy that did not reach agreement, was the reason for justifying military actions I and II. The action was in the international spotlight which then urged the Dutch to end the conflict by holding KMB on 23 August 1949 in Den Hag, Netherlands. Consensus was reached, 27 December 1949 The Republic of Indonesia Official Union was declared standing.

**Keywords:** Diplomacy, Aggression, State, Federal

**Abstrak:** Artikel bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas peristiwa-peristiwa pasca kemerdekaan dalam proses pembentukan negara RIS (Republik Indonesia Serikat). Berawal dari peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik awal perjuangan untuk menjadi negara yang seutuhnya. Kedatangan Belanda pada tanggal 16 September 1945 dalam rangka untuk menanamkan kekuasaannya kembali ditentang oleh semua lapisan-lapisan masyarakat. Perlawanan-perlawananpun terjadi di berbagai daerah, perang dan diplomasi adalah dua jalan yang terus beriringan dalam proses penyelesaian sengketa. Propaganda sebagai alat yang mujarab digunakan oleh Belanda untuk memecah belah negara Indonesia, usaha tersebut kemudian berhasil dengan terbentuknya negara - negara federal (negara boneka bentukan Belanda). Diplomasi yang tidak kunjung mencapai kata sepakat, menjadi alasan pembenaran aksi Agresi Militer I dan II. Aksi tersebut menjadi sorotan dunia internasional yang kemudian mendesak pihak Belanda untuk mengakhiri konflik dengan menyelenggarakan KMB pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Hag, Belanda. Konsensuspun tercapai, 27 Desember 1949 Republik Indonesia Serikat Resmi dinyatakan berdiri.

**Kata Kunci:** Diplomasi, Agresi, Negara, Federal

## PENDAHULUAN

Pasal 1 konvensi Montevideo 27 Desember 1933 yang membahas mengenai hak dan kewajiban Negara, memaparkan bahwa Negara yang merupakan subjek hukum internasional harus memiliki empat unsur yaitu: penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintah yang berdaulat dan kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain (Jawahir thontowi, 2006: 105). Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memenuhi hampir keseluruhan kriteria pembentukan negara. Unsur yang masih diperjuangkan dan menjadi sengkata Indonesia dan Belanda yaitu masalah kedaulatan negara. Kemerdekaan Indonesia merupakan awal perjuangan rakyat untuk mencapai kemerdekaan yang hakiki. Proklamasi yang telah dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik awal perjuangan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang dipersatukan dalam suatu negara kesatuan (nation state) dalam menghadapi berbagai permasalahan internal maupun eksternal. Perdebatan-perdebatan tokoh-tokoh revolusi terus terjadi namun dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah untuk mencapai konsensus bersama.

Sebagai new state Indonesia dihadapkan oleh berbagai permasalahan yang akan menjadi penyebab perubahan besar bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Bentuk negara Indonesia yang baru berjalan selama empat tahun harus berubah demi kepentingan nasional, perubahan inipun memicu perbedaan pendapat yang panjang antara beberapa pihak. Berubahnya bentuk negara kesatuan menjadi federal ini disebabkan oleh beberapa faktor baik secara langsung dan tidak langsung yaitu adanya revolusi sosial yang terjadi di daerah-daerah, kendornya hubungan pemerintah pusat dan daerah, munculnya militer sebagai kekuatan baru, serta sebagai puncaknya yaitu peristiwa agresi militer Belanda I dan II yang kemudian diselesaikan melalui konferensi meja bundar (KMB).

## METODE PENELITIAN

Metode dalam penulisan kajian ini menggunakan metode sejarah (*History*). Metode sejarah merupakan cara atau teknik dalam merekonstruksi peristiwa masa lampau, melalui empat tahapan kerja, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (eksternal/bahan dan internal/isi), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan kisah sejarah) (Hamid dan Madjid, 2011: 43). Metode sejarah sebagai perangkat asas dan aturan yang sistematis didesain untuk membantu secara efektif agar dapat mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis dan menyajikan hasil-hasil yang telah dicapainya dan ditampilkan dalam bentuk tertulis (Daliman, 2012: 75).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Revolusi Sosial (*Social Revolution*)

Perubahan sangat cepat yang diakibatkan oleh kemerdekaan, bukan hanya terasa di ibukota namun juga terasa diberbagai daerah-daerah. Sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Indonesia dibagi menjadi dua golongan utama yaitu golongan priyai dan golongan masyarakat biasa. Golongan priyai sangat diuntungkan baik itu pada zaman Belanda maupun zaman Jepang. Kedudukan sebagai seorang bangsawan mengakibatkan seseorang dapat dengan mudah untuk menduduki jabatan-jabatan strategis yang ditawarkan pihak Belanda serta dengan leluasa untuk mendapatkan akses pendidikan. Kesenjangan sosial yang telah terjadi sekian lama semakin diperparah dengan kondisi ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan yang tidak stabil. Disebutkan dalam buku yang dikarang oleh Jan Luiten Van Zanden dan Daan Marks yang berjudul *An Economic History of Indonesia 1800-2010* bahwa *the republican government had very limited sources of income* (Luiten, 2012:136).

keterbatasan sumber pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia berdampak pada terjadinya defisit hingga menginjak angka Rp. 1,6 juta pada tahun 1948 dan pada tahun 1949 mencapai angka Rp. 1,5 juta.

Kondisi ekonomi serta perlakuan khusus yang didapatkan oleh kaum priyai ini menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial yang sangat parah. Kondisi tersebut kemudian menjadi pemantik terjadinya peristiwa revolusi sosial pada beberapa daerah yang ada di Indonesia. Di Aceh, permusuhan sengit anatar para pimpinan agama (ulama) dan para bangsawan birokrat (uleëbalang) mengakibatkan timbulnya suatu perubahan yang permanen di tingkat elit (M.C. Ricklefs, 2007: 443). Akibat peristiwa ini uleëbalang menghendaki pihak Belanda dapat kembali menduduki wilayah Indonesia agar mereka dapat perlindungan dari Belanda serta mendapatkan kedudukannya kembali dalam pemerintah Hindia-Belanda. Tidak hanya di Aceh, di Sumatera Timur atau yang kita kenal sekarang sebagai Sumatera Utara, kelompok-kelompok bersenjata yang sebagian besar terdiri atas orang-orang Batak dan dipimpin oleh kaum kiri, menyerang raja-raja Batak Simalungun dan Batak Karo pada bulan Maret 1946 (M.C. Ricklefs, 2007: 444). Peristiwa revolusi sosial bukan hanya terjadi di pulau Sumatera, di Pulau Jawa, peristiwa tiga daerah yaitu Berebes, Pemalang dan Tegal juga melakukan revolusi sosial sebagai luapan emosi kekesalan akibat ketertindasan pada masa pendudukan Jepang.

Peristiwa-peristiwa revolusi sosial ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak Belanda untuk menanamkan kekuasaannya kembali melalui para priyai atau kaum bangsawan yang posisinya tergerser dan membutuhkan perlindungan sebagai salah satu dampak berdirinya negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan. Dengan dalih kewajiban Belanda sebagai negara yang pernah menduduki Indonesia, Belanda kemudian

melaksanakan pagelaran seni, konferensi dan propaganda untuk melegalkan serta untuk mendapatkan simpati dari priyai dan Amerika. Adrian Vickers mengemukakan bahwa *The Dutch played up to this by using touring art exhibitions and other propaganda to argue that it was natural for the Netherlands to keep Indonesia as a Federation under the Dutch Queen* (Vickers, 2005:111).

Keberhasilan Belanda untuk membujuk kaum priyai ditandai dengan terselenggaranya konferensi di Kota Malino, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Juli - 25 Juli 1946 yang menghasilkan kesepakatan rencana pembentukan Negara Indonesia Timur. Bila menganalisis alur dari peristiwa yang terjadi, revolusi sosial yang begitu cepat merupakan penyebab mengapa Belanda mengambil kesempatan untuk kembali memecah belah Indonesia dengan harapan bahwa membentuk negara-negara boneka menjadi kunci sukses untuk merebut kekuasaan dari pemerintah.

## **2. Kendornya Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.**

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 tidak berjalan baik. Masalah-masalah yang terjadi di daerah hanya diatasi oleh pemerintah setempat. Pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang dinggap sesuai dengan kebutuhan daerah setempat. Namun, akibat dari langkah tersebut pemerintah tidak bisa mengontrol kebijakan-kebijakan daerah, terlebih pada awal kemerdekaan, sarana transportasi dan komunikasi masih sangat terbatas ditambah permasalahan - permasalahan rumit lainnya yang harus dihadapi oleh pemerintah pusat.

Kerenggangan hubungan yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh banyaknya masalah yang sedang dihadapi pemerintah pusat. Keputusan penyatuan Sumatera dalam satu provinsi menjadi masalah

tersendiri. Penetapan Sumatera menjadi satu provinsi dalam sidang PPKI pada bulan Agustus 1945 ditentang oleh Hatta, Hatta kemudian mengusulkan agar dibentuk tiga provinsi di pulau ini, karena menurut pendapatnya Pulau Sumatera terlalu luas dan terlalu beragam bagi suatu pemerintah untuk menjalankan kontrol yang efektif (Kahin, 2005: 192). Ketidak efektifan ini kemudian dirasakan pada tahun-tahun awal kemerdekaan, keresidenan-keresidenan yang telah dibentuk memonopoli hampir semua kekuasaan dan wewenang pemerintah, serta mengabaikan kewibawaan Provinsi Sumatera yang merupakan representatif dari pemerintah pusat.

Pemerintah pusat yang dihadapkan oleh banyak permasalahan tidak mampu menjaga hubungan dengan pemerintah daerah, bahkan peristiwa revolusi sosial yang ada di berbagai daerah tidak mampu dibendung. Keadaan tersebut semakin memburuk diakibatkan adanya perpecahan antara tokoh-tokoh elite revolusi terkait jalan diplomasi yang diambil oleh pemerintah serta munculnya militer sebagai kekuatan politik baru yang menambah pekerjaan rumah pemerintah pusat. Kerenggangan yang terjadi diamabil sebagai momentum Belanda untuk mendirikan negara-negara boneka.

Kerenggangan hubungan yang dialami oleh pemerintah ini telah banyak diamati oleh para peneliti. Yong Mun Cheong dalam buku *The Emergence of The National Economy; An Economic History of Indonesia 1800-2000* menjelaskan bahwa *During the Revolution, political links with Java had also become tenuous. And when the Dutch re-established control over the Outer Islands, they encouraged a kind of puppet federalism that promised a degree of local autonomy with a democratic façade* (Dick, Dkk, 2002: 30). Pernyataan diatas menggambarkan hubungan yang renggan antar pemerintah pusat dan daerah menyebabkan Belanda dapat dengan mudah melalui propaganda-propagandanya untuk

membentuk negara boneka. Steven dalam buku *The History of Indoensia* juga memeperjelas mengenai hal ini. *That events should have taken this turn is somewhat surprising, given the dire circumstances confronting the fledgling republic. An often-violent social revolution threatened a collapse of the tenuous governmental structure* (Darakeley, 2005:84). Revolusi sosial yang terjadi di daerah menambah kerenggangan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Kerenggangan inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor terbentuknya negara-negara boneka sebagai cikal bakal negara-negara federal.

### 3. Militer Sebagai Kekuatan Politik Baru

Diawal kemerdekaan Militer bukan hanya sebagai alat untuk mempertahankan negara, tetapi dengan langkah perlahan mulai menyentuh sendi-sedi perpolitikan tanah air. Namun, kekuatan politik di dalam tubuh militer sifatnya tercerah-berai, ada dua kelompok utama dalam tubuh militer, kelompok pertama merupakan prajurit bekas PETA dan HEIHO serta laskar-laskar yang tidak pernah mendapatkan pelatihan militer dimasa pra Jepang, kelompok ini direpresentatitkan oleh Jendral Soedirman yang dipilih sebaga panglima besarnya pada bulan November 1945. kelompok lainnya adalah bekas serdadu Belanda yang menganggap kejatuhan Belanda oleh Jepang pada tahun 1942 membemaskan mereka dari sumpahnya kepada Ratu Belanda, tokoh sentral dalam kelompok ini adalah A.H. Nasution dan T.B. Simatupang (Ricklefs, 2007: 446-447)

Pemebentukan dan peleburan para pejuang Indonesia kedalam TKR pada awalnya bertujuan untuk memperbaiki garis komando dan memperjalas tugas dan tanggung jawab sebagai tentara republik Indonesia. Peleburan ini menemui beberapa kesulitan-kesulitan disebabkan adanya perbedaan pola pikir antara beberapa pejuang yang akan di lebur. Pejuang bekas tentara HEIHO, Peta dan laskar-laskar tidak

menghendaki adanya tentara bekas KNIL yang dianggap telah berhianat kepada bangsa. Protes semakin keras terjadi ketika diangkatnya R.A.H. Nasution sebagai Panglima Divisi Siliwangi di Jawa Barat, protes ini bukan hanya terdengar dari golongan prajurit namun juga dilakukan oleh elite-elite revolusi yang menghendaki Jendral Sudirman sebagai panglima perang.

Setelah diangkatnya Nasution, dengan pengalaman yang telah didapatkannya sebagai prajurit profesional yang terlatih, diharapkan mampu mengkoordinir prajurit. Namun, dalam prakteknya banyak tentara di daerah-daerah masih tidak mengharapkan Nasution, sehingga garis koordinasi yang seharusnya terbangun tidak terealisasi, komunikasi yang kurang tersebut yang dikemudian hari menciptakan gejala pemberontakan yang dilakukan oleh laskar-laskar di daerah. Garis komando dan pepercahan militer ini menyebabkan kekuatan TKR sebagai baris pertahanan utama negara sangat mudah dikalahkan oleh pihak Belanda. Diawal kembalinya Belanda ke Indonesia, Belanda lebih banyak memfokuskan kegiatan-kegiatan baik militer maupun usahanya untuk membentuk negara federal diluar Jawa disebabkan oleh kurangnya kekuatan militer didaerah-daerah tersebut serta garis komando yang kurang terkoordinasi.

#### 4. Agresi Militer

Kekalahan Jepang terhadap sekutu menandai berakhirnya pendudukan terhadap Indonesia. Berdasarkan persetujuan Postdam, isi *Civil Affairs Agreement* diperluas, sekutu bertanggung jawab untuk mengawasi Indonesia dan seluruh area yang masuk dalam *South West Pasific Areas Command*. Pada tanggal 16 September 1945 sekutu mendarat di pelabuhan tanjung perak surabaya. Kedatangan NICA di Indonesia ditanggapi oleh masyarakat dengan sangat hati-hati. NICA yang memboncengi Belanda kemudian mendapatkan ancaman-ancaman perlawanan dari rakyat Indonesia.

Perlawanan-perlawanan yang terjadi kemudian meredam setelah pemerintah memutuskan jalan diplomasi untuk menyelesaikan sengketa dengan pihak Belanda. Mengatasi ketegangan yang terjadi pemerintah melaksanakan perundingan, pihak Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir dan pihak Belanda diwakili oleh Prof. Schermerhon. Pada tanggal 15 November 1946 perundingan ini melahirkan perjanjian Linggarjati yang resmi ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 25 Maret 1947. Colin Brown (2003: 165) menjelaskan bahwa "*This agreement provided that by 1 January 1949 Indonesia would become independent as a federation joining the Republic (on Java and Sumatera) and two still-to-be-created states of Borneo and the Great East (Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku and West New Guinea)*"

Hasil perundingan Linggarjati walaupun menuai pro dan kontra dikalangan elit tokoh revolusi, bila ditinjau secara holistik perjanjian tersebut menguntungkan kedua belah pihak. Indonesia mendapatkan pengakuan secara *de facto* walaupun masih dalam lingkup Jawa, Sumatera dan Madura dan disisi lain dengan terselenggaranya perjanjian Linggarjati, memuluskan langkah pemerintah kolonial untuk membentuk negara federal sesuai dengan yang telah lama dicita-citakan. Prof. Dr. Slamet muljana dalam bukunya *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia*, menyebutkan bahwa tiga minggu setelah penandatanganan perjanjian linggarjati Belanda melaksanakan konfrensi Denpasar (Muljana, 1969: 211). Konfrensi ini dilaksanakan guna menindaklanjuti usaha pembentukan negara-negara federal sesuai dengan hasil konfrensi malino dan isi perjanjian linggarjati.

Pengakuan secara *de facto* yang diterima tidak menjadikan sikap kontra dan kecurigaan-kecurigaan terhadap Belanda mereda. Sehari setelah perjanjian ini disahkan yakni pada tanggal 16 november 1946, Belanda melakukan pendudukan di

Bogor yang menyebabkan rusaknya kepercayaan rakyat Indonesia terhadap perjanjian tersebut. Walaupun Mr. Mohamad Roem berhasil memulihkan pemerintahan sipil di Bogor dengan bantuan Lord Killearn dan delegasi Belanda kepercayaan rakyat yang telah rusak tidak bisa dikembalikan secara utuh (Tobing, 1986: 1). Selain dari rakyat Indonesia penolakan dan ketidakpercayaan terhadap perjanjian Linggarjati juga terjadi dikalangan tokoh elite revolusi Indonesia.

Amir Syarifuddin adalah salah satu pihak yang tidak menyetujui hasil dari perjanjian Linggarjati walaupun berada dalam satu partai bersama Sutan Syahrir yaitu partai sosialis. Ketidak senangan ini terbukti dengan penjatuhan kabinet yang dipimpin oleh Sutan Syahrir oleh partainya sendiri. Presiden Soekarno menunjuk Amir Sjarifuddin, A.K. Gani, dan Setiadjid untuk membentuk Kabinet Nasional. Setelah Sjahrir turun dari jabatan Perdana Menteri, ia kemudian diangkat sebagai penasihat presiden (Tcokropranolo, 1992: 91). Setelah memegang jabatan kabinet Amir Syarifuddin mengadakan pertemuan bersama Jendral Van Mook pada tanggal 14 hingga 15 juli 1947. Dalam pertemuan ini pihak Belanda menghendaki penghentian propaganda anti Belanda, penjagaan pos perbatasan oleh *Gendarmerie* yaitu polisi campuran Belanda-Indonesia, serta mundurnya tentara Indonesia sejauh 10 kilometer dari perbatasan yang harus terselenggara pada tanggal 20 juli 1947.

Bila ditelaah secara mendalam langkah Belanda untuk mengambil jalan diplomasi merupakan bentuk keterdesakan oleh pihak sekutu. Garis politik di Negeri Belanda tidak pernah membenarkan dilakukannya segala bentuk perundingan dengan pihak Indonesia (Sastrosastomo, 1987: 171). Kelamahan pondasi perundingan dari pihak Belanda ini yang kemudian menyebabkan Belanda melakukan agresi militer I. selain alasan yang telah disebutkan kondisi

perekonomian negeri Belanda pasca perang dunia tidak stabil. Ketidak stabilan ekonomi disebabkan oleh jatunya Belanda ketangan Jerman, dan setelah Belanda mendapatkan kebebasannya, negara tersebut membangun negerinya dengan bantuan pihak Amerika Serikat. Untuk menyudahi ketergantungan terhadap negara lain, pihak Belanda harus mendapatkan pemasukan yang selama ini bersumber dari hasil perdangangan di negara Indonesia.

Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin yang merupakan tokoh sayap kiri, tidak mencapai kesepakatan dalam perundingan dengan pihak Belanda. Tidak berhasilnya perundingan tersebut menjadi alasan Dr. Louis Beel dalam pidatonya pada tanggal 21 Juli 1947 memberikan kekuasaan penuh Van Mook untuk melakukan aksi militer karena menganggap pihak Indonesia melanggar isi dari perjanjian Linggarjati. Sehari sebelum pidato tersebut, bila dianalisis secara mendalam pihak Belanda telah mempersiapkan aksi agresi militer, hal tersebut ditandai dengan pemutusan hubungan telepon antara Jakarta dan Yogyakarta sejak tanggal 20 Juli 1947 (Tcokropranolo, 1992: 93).

Setelah diberikannya kekuasaan penuh, Van Mook melakukan agresi militer I yang berlangsung pada tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus 1947. Dunia internasional mengenal peristiwa ini sebagai aksi polisional (*police action*) akibat propaganda Belanda, dalam pengakuannya, aksi tersebut bertujuan untuk mengamankan Indonesia. Namun, tujuan aksi ini yang sebenarnya adalah untuk menduduki wilayah Jawa Barat, perluasan daerah-daerah yang telah didukinya di sekitar kota besar di Jawa seperti Semarang dan Surabaya, serta pendudukan daerah-daerah perkebunan dan penghasil minyak seperti Deli, Palembang dan sekitarnya (Gde Agung, 1985: 45).

Aksi polisional yang dilakukan oleh pihak Belanda terhadap Indonesia membuat

geram dunia internasional. Amerika Serikat bersama Australia, India, Inggris dan Uni Soviet dalam PBB mengarahkan Belanda untuk menghentikan aksi tersebut. Tekanan-tekanan yang diberikan oleh pihak sekutu yang notabene merupakan negara penyokong pembangunan ekonomi di Belanda yang hancur akibat perang menyebabkan pihak Belanda menerima imbauan PBB untuk melakukan gencatan senjata (*Cease Fire*). Segera setelah dilakukannya gencatan senjata, Sutan Syahrir diundang untuk berbicara di depan PBB sebagai wakil rakyat Indonesia, PBB tidak mengambil perwakilan dari daerah-daerah yang dikuasai oleh Belanda dengan pertimbangan daerah tersebut tidak netral sebagai wujud representatif rakyat yang bebas dan netral. Dalam pidatonya Syahrir memuji keputusan PBB untuk mengakhiri permusuhan antara pihak Belanda dan Indonesia, Syahrir juga menyampaikan kesiapan RI untuk menerima arbitrase yang tidak memihak dan netral (Tcokropranolo, 1992: 96).

Pada bulan Oktober dibentuk komisi jasa-jasa baik PBB yang beranggotakan wakil-wakil Amerika, Australia dan Belgia untuk membantu perundingan-perundingan Belanda-Republik untuk mencapai gencatan senjata yang baru. Pihak Belanda telah melanjutkan operasi-operasi pembersihan dibelakang garis terdepan mereka, dimana banyak pejuang Republik tinggal (M.C. Ricklefs, 2007: 454). Komisi jasa-jasa baik atau yang lebih dikenal dengan komisi tiga negara kemudian memfasilitasi diadakannya perundingan. Colin Brown dalam bukunya *The Short History of Indonesia* menjelaskan bahwa:

*“Under GOC auspices, negotiations between the two sides took place in January 1948 and produced the Renville Agreement, named for the American ship on which the negotiations had taken place. Under the agreement, the Republic conceded to the Dutch the territories that it had lost in the attack, in return for another Dutch promise*

*of eventual independence”* (Brown, 2003, 196).

Segera setelah disepakatinya perjanjian *Renville*, Belanda kembali menggencarkan pembentukan negara-negara federal dibawah kekuasaannya. Negara-negara federal yang dibentuk antaralain pada bulan Desember 1947 dibentuk Negara Sumatera Timur, pada bulan Februari 1948 berdiri Negara Madura dan di Jawa Barat yang disebut Negara Pasundan, pada bulan september berdiri Negera Sumatera Selatan dan pada bulan November 1948 dibentuk Negara Jawa Timur, peristiwa tersebut terus berlangsung hingga terbentuk 15 negara federal. Selain membentuk negara federal, sesuai kesepakatan dalam perjanjian *Renville* tentara Indonesia harus meninggalkan wilayah-wilayah yang masuk dalam kekuasaan Belanda sesuai dengan garis demarkasi Van Mook yang telah disepakati dalam perjanjian *Renville*.

Berakhirnya agresi militer Belanda I dan disetujuinya perjanjian *Renville* mengubah arah perpolitikan Indonesia. Golongan kiri yang selama awal kemerdekaan ditempatkan dalam struktur pemerintahan mulai tersingkir. Tersingkirnya golongan kiri merupakan cikal bakal terjadinya pemberontakan PKI pada tanggal 18 september 1948 ditengah konflik yang masih terjadi antara pihak Belanda dan Republik. Usaha pemerintah dalam mengatasi pemberontakan tersebut menarik simpati pihak Amerika yang tengah berseterudalam perang dingin (ideologi) dengan Uni Soviet. Keseriusan Indonesia dalam memberantas pemberontakan yang dilakukan PKI menjadi penyebab mengapa Amerika memberikan sokongan kepada pihak Indonesia dalam rapat-rapat PBB yang diselenggarakan guna menyelesaikan masalah sengketa antara Indonesia-Belanda.

Perjanjian *Renville* mengurangi wilayah kekuasaan Indonesia yang telah diakui secara *de facto* sangat merugikan

pihak Indonesia. Wilayah-wilayah penghasil kebutuhan pokok telah dikuasai oleh pihak Belanda menyebabkan perekonomian Indonesia memburuk terlebih ketika Belanda melakukan blokade-blokade ekonomi. Pemblokadean ekonomi merupakan salah satu taktik pihak Belanda untuk melemahkan Indonesia. Perjanjian Renville nyatanya tidak menyelesaikan permasalahan sengketa antara Indonesia, perundingan-perundingan yang terjadi pasca perjanjian renville terus dilakukan, pihak Indonesia diwakili oleh Drs. Moh. Hatta yang juga merupakan pimpinan kabinet setelah mangkatnya Amir Syarifuddin sedangkan pihak Belanda diwakili oleh D. U. Stikker. Dalam proses perjalanan perundingan-perundingan yang dilakukan menemui titik buntu yang kemudian menjadi alasan mengapa Belanda melakukan Agresi militer Belanda II pada tanggal 19 September 1948.

Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Belanda sebenarnya tidak rela begitu saja untuk melepaskan wilayah jajahannya di nusantara melalui peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Maka dari itu Belanda mencoba menempuh berbagai cara agar dapat kembali menguasai tanah air, baik melalui meja perundingan maupun dengan aksi militernya yang pertama pada 20 Juli 1947 yang akhirnya dihentikan atas dasar Persetujuan *Renville* (U. Runalan, 2013: 74)

Agresi militer Belanda yang dilakukan ke ibukota Yogyakarta berhasil menahan Sukarno, Hatta, Syahrir dan H Agus Salim yang kemudian diasingkan ke Prapat dan Bangka. Untuk mempertahankan pemerintah RI maka dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat dan dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara (Putro, 2018: 37). Pada tanggal 1 maret 1949 sebagai aksi balasan pihak militer mengadakan serangan umum ke wilayah ibu kota. Kolonel Bambang Sugeng melalui surat rahasia yang ditujukan

kepada Soeharto yang menjabat sebagai Komandan Wehrkreise III/Brigade X untuk melaksanakan serangan besar-besaran di Ibu Kota Republik Indonesia antara tanggal 25 Februari-1 Maret 1949 (Pour, 2012: 91).

Salah satu penyebab dilancarkannya serangan umum disebabkan oleh tidak dihiraukannya resolusi PBB yang keluar pada tanggal 28 Januari 1949 yang menyatakan sebelum tanggal 1 Januari 1950 Indonesia harus mendapatkan kedaulatan penuh. Baru pada tanggal 7 Mei 1949 dengan tekanan dari dunia internasional pihak Belanda yang diwakili oleh Van Roijen bersedia untuk mengadakan perundingan yang dilaksanakan di Hotel *des indes* bersama pihak Indonesia yang diwakili Moh. Roem. Hasil perundingan tersebut dikenal dengan perjanjian Roem-Roijen yang intinya mengenai penyelesaian sengketa Belanda-Indonesia akan dibahas dalam Konfrensi Meja Bundar.

## 5. Konfrensi BFO-RI Hingga KMB

Keberadaan Negara Federal di Indonesia telah lama diakui oleh pihak Belanda terlebih negara-negara tersebut terbentuk akibat inisiatif dari Belanda. Puncak pembentukan negara-negara federal terjadi pada tahun 1948, pihak Belanda secara sepihak mendeklarasikan berdirinya negara federal hingga terbentuknya 15 negara federal. Untuk memudahkan koordinasi antara negara-negara bentuk tersebut, maka disusunlah pertemuan untuk membentuk *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO) pada 15 Juli 1948. Hasil pertemuan ini memutuskan pengangkatan pengangkatan Tengkoeh Bahriun (Negara Sumatra Timur) sebagai ketua, Mohammad Hanafiah (Banjar) dan Sultan Hamid II (Kalimantan Barat) masing sebagai wakil I dan wakil II, Serta Mr. A.J. Vleer sebagai sekretaris (Leirissa, 2006: 121). Dalam perkembangannya BFO kemudian dilibatkan dalam perundingan-perundingan antara Indonesia - Belanda. Pada tanggal 22 Juni 1949 telah terjadi kesepakatan (*meeting*

*of minds*) mengenai konfrensi meja bundar yang dijabarkan dalam sebuah memorandum (Insaniwati, 2002: 152)

Setelah dikeluarkannya resolusi oleh PBB untuk memberikan kedaulatan kepada pihak Indonesia dan kesepakatan memorandum antara pihak BFO, Indonesia dan Belanda, BFO yang sebelumnya telah mengalami perubahan arah politik dengan terpilihnya Anak Agung Gde Agung sebagai perdana menteri Negara Indonesia Timur (NIT) menindak lanjuti rencana pertemuan yang akan dilaksanakan dalam KMB (Potro, 2018: 38). Gede Agung menghendaki berakhirnya pertikaian antara sesama rakyat Indonesia, tujuan tersebut yang kemudian menjadi landasan pelaksanaan konfrensi inter Indonesia untuk mencapai konsensus nasional yang dilaksanakan pada tanggal 20 - 22 Juli 1949 di Yogyakarta yang kemudian dilanjutkan pada tanggal 30 Juli sampai 02 Agustus 1949 di Jakarta. Hal serupa juga dikemukakan oleh Drs. Moh. Hatta dalam buku Mohammad Hatta: Indonesian Patriot Memoirs bahwa *“The main topic of discussion was the join approach we would take when the Round Table Conference was held at The Hoge.... An agreement was reached and it would seem that this made the Dutch government feel rather hemmed in”* (Hatta, 1981: 303).

Pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan pihak Indonesia diwakili oleh Drs. Moh. Hatta sedangkan pihak BFO diwakili oleh Sultan Hamid II. Pertemuan ini menghasilkan konsensus antara kedua belah pihak mengenai lambang negara, bendera negara, lagu nasional, landasan konstitusional, lembaga-lembaga negara dan pembentukan APRIS serta aturan-aturan mengenai hak dan kewajiban negara-negara bagian. Konsensus antara kedua belah pihak ini yang nantinya membuat Belanda terjepit khususnya dalam perundingan babak akhir Konfrensi Meja Bundar karena menyadari bahwa mereka bukan hanya berhadapan dengan pihak republik melainkan juga berhadapan dengan

golongan yang menginginkan bentuk negara serikat (Giebels, 2001: 437).

Setelah terselenggaranya pertemuan intern Indonesia, pihak Indonesia, BFO dan Belanda menghadiri konfrensi meja bundar yang diadakan di Den Hag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949. Pihak Indonesia diwakili oleh panitia pusat yakni Drs. Moh. Hatta, dan beranggotakan Prof. Dr. Supomo, Mr. M. Roem, Ir. Juanda, dr. Sukiman, Mr Suryono Hadinoto, Dr. Sumitro Joyohadikusumo, dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamijoyo dan Kolonel Simatupang, mereka dibantu oleh 40 penasihat ahli diberbagai bidang (Hutagalung, 2010: 5013). Dalam konfrensi meja bundar, pihak Belanda atas desakan anggota-anggota PBB, RI dan BFO menyepakati pengakuan secara *de jure* dan *de facto* terhadap Indonesia dan pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai bentuk realisasi kesepakatan dalam KMB maka pihak Belanda memberikan kedaulatan secara penuh kepada Indonesia dalam bentuk republik Indonesia serikat (RIS).

Pemberian kedaulatan dilakukan di dua tempat yang berbeda yakni pada tanggal 27 Desember 1949 Perdana menteri Hatta menerima penyerahan kedaulatan dari perdana menteri Willen Dress di Den hag yang dalam penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan dilakukan juga oleh Ratu Juliana dan menteri seberang lautan A.M.J.A. Seresen, tepat di tanggal yang sama berlokasi di Jakarta, Hamengku Buwono IX menerima kedaulatan dari Wakil Tinggi Mahkota kerajaan Belanda A.H.J. Lovink (Wiharyanto, 2011: 70-71). Tepat pada tanggal 27 Desember 1949 di Indonesia dan Negeri Belanda terjadi upacara penandatanganan naskah “penyerahan” kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada RIS. Istilah penyerahan perlu diberi tanda kutip karena sebenarnya Belanda tidak perlu menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia karena negara ini telah memiliki kedaulatannya secara *de jure* pada tanggal

17 Agustus 1945. “Penyerahan” kedaulatan berarti secara formal pemerintah Belanda telah mengakui kedaulatan Indonesia (Zulkarnain, 2009). Dengan demikian, perang kemerdekaan yang berlangsung sejak tahun 1945 telah berakhir berkat perjuangan militer serta diplomasi yang terus-menerus dilakukan oleh bangsa Indonesia.

Setelah pengakuan kedaulatan 1949 suasana berangsur-angsur pulih, masalah pelik dibidang keamanan dan ketertiban sudah dapat diatasi oleh pemerintah Indonesia (Chaniago, Dkk, 1987: 18). Republik Indonesia Serikat yang berdiri sesuai keputusan yang termaktub dalam KMB memutuskan bahwa RIS terdiri dari 16 negara bagian atau negara negara federal yaitu: Negara Pasundan, Republik Indonesia, Negara Jawa Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Selatan, Negara Sumatera Timur, Negara Riau Negara Jawa Tengah, Negara Dayak Besar, Negara Bangka, Negara Belitung, Negara Kalimantan Timur, Negara Kalimantan Barat Negara Kalimantan Tenggara, Negara Banjar dan Negara Dayak Besar. Dalam perjalanannya negara-negara tersebut memutuskan kembali menjadi bentuk kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.

## KESIMPULAN

Negara Republik Indonesia Serikat resmi terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949 bertepatan dengan penyerahan kedaulatan oleh pihak Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat. Bila ditinjau dari sudut pandang perjalanan historis, terdapat beberapa peristiwa yang menjadi penyebab langsung dan tidak langsung yaitu terjadinya revolusi sosial, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kendor, munculnya militer sebagai kekuatan politik baru dan terjadinya agresi militer I dan II.

Nagara-negara federal itu sendiri mulai dibentuk oleh Belanda secara sepihak melalui propaganda - propagandanya. Setelah lahirnya perjanjian Linggarjati dan pada saat disepakatinya perjanjian renville, Belanda semakin gencar untuk membuat negara- negara baru hingga keseluruhan negara yang terbentuk berjumlah 15 negara. Negara-negara tersebutlah yang kemudian menjadi cikal bakal negara federal yang diakui sebagai negara bagian Republik Indonesia Serikat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Ida Anak Agung Gede. 1985. *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gadjah Mada Univesitas Press.
- Brown, Collin. 2003. *The Short History of Indonesia*. Australia: Allen & Unwin.
- Chaniago, J.R, Dkk. 1987. *Ditugaskan Sejarah: Perjuangan Merdeka 1945-1985*. Jakarta: PT. Masa Merdeka.
- Cribb, Robert, Audrey Kahin. 2004. *Historical Dictionaries of Indonesia Second Edition: Historical Dictionaries of Asia, Oceania and The Middle East*. Amerika: Scarecrow Press.
- Daliman A. 2012. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Darkeley, Steven. 2005. *The History of Indonesia: The Greenwood History of Indoneisia*. London: Grenwood Press.
- Dick, Howard, Dkk. 2002. *The Emergence of A National Economy: An Economic History of Indonesia 1800-2000*. Australia: Allen & Unwin.
- Giebels, Lambert. 2001. *Soekarno: Biografi 1901-1950*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Hamid, Abd Rahman dan Madjid, Muhammad Saleh. 2011. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak

- Hutagalung, Batara R. 2010. *Serangan Umum 1 Maret 1949: Dalam Kaledoskop Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Insaniwati, Nur Iin. 2002. *Mohammad Roem: Karir Politik dan Perjuangannya, 1924-1968*. Yogyakarta: Indonesiatara.
- Hatta, Mohammad. 1981. *Mohammad Hatta, Indonesian Patriot: Memoirs*. Jakarta: Gunung Agung.
- Julius Pour. 2012. *Sepanjang Hayat Bersama Rakyat 100 Tahun Sultan Hamengku Buwono IX*. Jakarta: Kompas.
- Kahin, Audrey. 2005. *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Leirissa, R. Z. 1985. *Terwujudnya Suatu Gagasan: Sejarah Masyarakat Indonesia 1900 - 1950*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- M.C. Ricklefs. 2007. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- M. Muljana, Slamet. 1969. *Nasionalisme sebagai Modal Perjuangan Indoneisia*. Flores: Nusa Indah.
- Philips, A Douglas. 2005. *Modern World Nation: Indonesia*. Amerika: Chelsea House Publishers.
- Sastrosastomo, Soebadio. 1987. *Perang Revolusi*. Jakarta: Pustaka Sinar harapan.
- Thontowi, Jawatir. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.
- Tjokropranolo. 1992. *Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman, Pemimpin Pendobrak Terakhir Penjajahan di Indonesia*. Jakarta: Surya Persindo.
- Tobing, K.M.L. 1986. *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati*. Jakarta: Gunung Agung.
- U. Runalan. 2013. *Perundingan Roem-Roijen dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1949*. *Jurnal Artefak*, Vol. 1, No.1 Januari.
- Vickers, Adrian. 2005. *A History of Modern Indonesia*. New York: Cambridge University Press.
- Wiharyanto, Kardiyat A. 2011. *Sejarah Indonesia: Dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Darma.
- Zanden, Jan Luitren Van, Daan Marks. 2012. *An Economic History of Indonesia*. Amerika: Routledge.
- Zulkarnain. 2009. *Ketatanegaraan Indonesia Pascakemerdekaan*. *Jurnal Istoria* Vol. 7 No. 1. 09, Staff.uny.ac.id.